

Kajian historis etika kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Peradaban Intelektual Islam

Nasywa Khairunnisa, Achmad Maftuh Sujana, Riffati Hikmi Mori, Azwa Naila Fath, Hanifara Dyasti Rahayu

Prodi Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Co-Author: ***Nasywa Khairunnisa**

E-mail: *nasywaakhrnn.188@gmail.com, maftuhsujana@gmail.com,
riciceta@gmail.com, azwanailafath@gmail.com, hanifaradyasti19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis etika, moral, dan intelektual kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam konteks pembentukan peradaban Islam awal. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelusuri nilai-nilai kepemimpinan yang tercermin dalam prinsip keadilan sosial, kejujuran politik, dan kebijaksanaan hukum, serta dimensi moral seperti keberanian, keikhlasan, dan integritas diri. Hasil kajian menunjukkan bahwa Khalifah Ali memadukan kekuatan akal, spiritualitas, dan moralitas dalam mengelola pemerintahan, menjadikannya model kepemimpinan yang berorientasi pada kebenaran dan kemaslahatan umat. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk diterapkan pada sistem pemerintahan modern, pendidikan karakter, dan pengembangan peradaban intelektual kontemporer. Dengan demikian, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menjadi simbol harmonisasi antara ilmu, iman, dan akhlak sebagai dasar kemajuan peradaban Islam.

Kata Kunci: *etika kepemimpinan, moral islam, peradaban intelektual*

ABSTRACT

This study aims to examine the historical aspects of ethical, moral, and intellectual leadership of Caliph Ali ibn Abi Talib in the formation of early Islamic civilization. Using a qualitative approach through library research, this study explores the leadership values reflected in principles of social justice, political honesty, and legal wisdom, as well as moral dimensions such as courage, sincerity, and personal integrity. The findings indicate that Caliph Ali integrated intellect, spirituality, and morality in governing, establishing a model of leadership oriented toward truth and public welfare. These values remain relevant for modern governance, character education, and the development of contemporary intellectual civilization. Thus, the leadership of Ali ibn Abi Talib represents the harmonization of knowledge, faith, and ethics as the foundation of Islamic civilizational progress.

Keywords: *ethical leadership, islamic morality, intellectual civilization*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan sosok sentral dalam sejarah Islam yang dikenal karena perpaduan antara kecerdasan intelektual, keteguhan moral, dan kepemimpinan etis. Ia memimpin umat Islam pada masa penuh gejolak setelah wafatnya Rasulullah dan masa pemerintahan para khalifah sebelumnya. (Masqon, 2016) Dalam situasi yang diwarnai konflik politik dan sosial, Ali tampil bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai figur spiritual dan cendekiawan yang menghidupkan nilai-nilai keadilan, hikmah, dan ilmu pengetahuan. Pemerintahannya (656–661 M) menjadi tonggak penting dalam pembentukan paradigma moral dan intelektual peradaban Islam, ketika nilai-nilai keislaman diuji dalam realitas politik yang kompleks. Ali menampilkan kepemimpinan yang tidak didorong ambisi kekuasaan, melainkan oleh cita-cita luhur untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam ruang sosial dan kenegaraan.

Kajian terhadap etika, moral, dan intelektual kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib penting dilakukan karena kepemimpinannya merepresentasikan transformasi nilai kenabian menjadi sistem etika politik dan sosial. Ali menegakkan konsep kepemimpinan berbasis amanah, kejujuran, dan ilmu, yang kemudian menjadi fondasi bagi teori kepemimpinan Islam sepanjang sejarah. Di tengah krisis nilai dan moralitas dalam dunia modern, keteladanan Ali memberikan gambaran nyata tentang bagaimana etika spiritual dapat berdialog dengan realitas politik tanpa kehilangan prinsip kebenaran. Penelitian terhadap aspek ini tidak hanya bersifat retrospektif-historis, tetapi juga relevan secara kontemporer, karena menunjukkan model kepemimpinan ideal yang berorientasi pada keadilan sosial dan kecerdasan akal budi. Oleh karena itu, analisis terhadap nilai-nilai kepemimpinan Ali merupakan upaya untuk menggali kembali akar moral peradaban Islam.

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib memiliki tiga pilar utama yang saling terkait, yaitu etika, moral, dan intelektual. Etika dalam konteks ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, kejujuran politik, dan kebijaksanaan hukum yang menjadi pedoman dalam mengelola pemerintahan. Moralitas menunjukkan keutuhan spiritual dan integritas diri seorang pemimpin yang berani menegakkan kebenaran di atas kepentingan pribadi. Sementara aspek intelektual menunjukkan kapasitas akal dan hikmah yang melahirkan budaya berpikir ilmiah dalam Islam. Ketiganya bukan entitas terpisah, melainkan struktur yang membentuk peradaban Islam awal sebagai sistem nilai yang utuh. Dengan memadukan akal, iman, dan etika sosial, Ali berhasil menanamkan prinsip bahwa kemajuan Islam bukan sekadar hasil dari kekuatan politik, tetapi dari kesempurnaan moral dan kecerdasan spiritual.

Khalifah Ali memandang ilmu dan moralitas sebagai dua unsur utama dalam membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa ilmu tanpa akhlak hanya akan menimbulkan kezaliman intelektual, sedangkan akhlak tanpa ilmu dapat melahirkan fanatisme yang membutakan. Pandangan ini menjadi dasar bagi perkembangan tradisi ilmiah dan etika politik Islam. Melalui kebijaksanaannya, Ali menumbuhkan budaya berpikir rasional, terbuka terhadap dialog, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal. Ia mengajarkan bahwa keadilan dan hikmah adalah pilar peradaban, dan pemimpin sejati adalah mereka yang menguasai ilmu, menjaga amanah, dan berbuat adil terhadap rakyatnya. Nilai-nilai ini bukan hanya membentuk struktur sosial-politik Islam masa itu, tetapi juga melahirkan semangat peradaban intelektual yang terus hidup hingga era modern. (Aini, 2022)

Penelitian ini berfokus pada kajian historis terhadap etika, moral, dan intelektual dalam kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan menelaah peran dan pengaruhnya dalam pembentukan peradaban Islam. Analisis ini menyoroti bagaimana prinsip keadilan sosial, integritas moral, dan rasionalitas intelektual menjadi satu kesatuan dalam sistem kepemimpinan Ali. (Al-Mufid, 2005) Kajian ini menggunakan pendekatan historis-analitis untuk menghubungkan konteks sosial politik masa Ali dengan relevansi nilai-nilai tersebut dalam peradaban Islam secara luas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa warisan kepemimpinan Ali tidak hanya membentuk arah pemerintahan Islam klasik, tetapi juga menjadi paradigma abadi bagi tata nilai etika dan intelektual umat manusia. Kepemimpinannya membuktikan bahwa kekuasaan yang sejati adalah kekuasaan yang berpijak pada ilmu, keadilan, dan kejujuran moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa nilai-nilai etika, moral, dan intelektual Khalifah Ali bin Abi Thalib bersifat konseptual, historis, dan normatif, sehingga memerlukan analisis interpretatif terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna di balik teks dan konteks sejarah, bukan sekadar mendeskripsikan fakta kronologis. Dengan demikian, metode ini diarahkan untuk menafsirkan data historis dan pemikiran tokoh secara mendalam melalui pembacaan kritis terhadap karya klasik dan modern yang relevan dengan peradaban Islam serta teori etika kepemimpinan.

Data penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab klasik seperti *Nahj al-Balāghah*, karya tafsir dan hadis yang memuat pandangan serta kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sumber sekunder meliputi karya ilmiah kontemporer, jurnal akademik, disertasi, dan buku-buku yang

membahas teori etika, moral, dan kepemimpinan Islam, termasuk karya Malik Bennabi, Ibn Khaldun, dan Al-Ghazali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengklasifikasi, dan menganalisis teks-teks yang memiliki relevansi langsung dengan tema kepemimpinan dan peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, interpretasi makna, dan sintesis tematik. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan terhadap fokus kajian, sedangkan interpretasi makna dilakukan dengan membaca teks secara hermeneutik menafsirkan kandungan makna moral dan intelektual yang tersembunyi di balik peristiwa historis. Selanjutnya, tahap sintesis tematik digunakan untuk merumuskan pola-pola nilai kepemimpinan Ali yang mencakup aspek etika, moral, dan intelektual dalam konteks peradaban Islam. Dengan metode analisis kualitatif ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana pemikiran dan tindakan Khalifah Ali menjadi fondasi peradaban Islam yang berbasis ilmu, keadilan, dan spiritualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Kepemimpinan

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu figur paling kompleks dan berpengaruh dalam sejarah Islam, baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemikir moral-intelektual. Masa pemerintahannya (656–661 M) berlangsung pada periode paling krusial dalam sejarah Islam, yakni setelah wafatnya Utsman bin 'Affan, ketika umat Islam mengalami gejolak politik, sosial, dan spiritual. Di tengah situasi yang sarat konflik, Ali menampilkan model kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai etika dan keadilan. Kepemimpinannya tidak dibangun atas dasar kekuasaan duniawi, melainkan berlandaskan pada prinsip moral, integritas spiritual, dan kebijaksanaan hukum yang mendalam. Sebagai khalifah keempat dari Khulafā' al-Rāsyidīn, Ali bukan hanya seorang kepala negara, tetapi juga seorang cendekiawan, ahli hukum, dan filsuf moral yang memandang kekuasaan sebagai amanah untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan umat. Nilai-nilai etis yang diusungnya menjadi refleksi dari warisan kenabian yang ia teruskan dalam bentuk praksis sosial-politik. Oleh karena itu, kajian terhadap etika kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami bagaimana peradaban intelektual Islam awal tumbuh di atas dasar moralitas, keilmuan, dan keadilan sosial yang integral. (Ash-Shalabbi, 2014).

1. Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial dalam kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi pilar utama pembentukan peradaban Islam yang

berkeadilan. Ia menolak segala bentuk perlakuan istimewa terhadap kaum elit atau kerabat dekatnya, termasuk ketika saudaranya sendiri, Aqil bin Abi Thalib, meminta bagian tambahan dari baitul mal. Ali menegaskan bahwa harta umat adalah milik seluruh rakyat, bukan alat politik atau keuntungan pribadi. Sikap ini menunjukkan pandangan egalitarian yang menempatkan rakyat dalam posisi sejajar di hadapan hukum dan negara. Dalam banyak kebijakannya, Ali berusaha mengembalikan prinsip 'adl (keadilan) sebagai dasar pemerintahan Islam, karena baginya, keadilan adalah keutuhan moral yang menegakkan keharmonisan sosial. Keadilan sosial inilah yang menjadi pondasi moral peradaban Islam yang kokoh dan humanis.

2. Kejujuran Politik

Kejujuran politik merupakan refleksi nyata dari integritas pribadi Khalifah Ali. Ia menolak segala bentuk tipu daya dan pragmatisme politik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran Islam. Dalam surat-suratnya kepada para gubernur seperti yang tercatat dalam Nahj al-Balāghah Ali menegaskan agar pejabat negara tidak memperlakukan rakyat sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai amanah. Ia lebih memilih kebenaran yang pahit daripada kemenangan yang diperoleh melalui kebohongan. (Audah, 2003) Sikap ini terlihat saat ia menolak menggunakan tipu muslihat terhadap Mu'awiyah meskipun hal itu dapat memperkuat kekuasaannya. Bagi Ali, kejujuran politik adalah bentuk ibadah dan cermin dari tanggung jawab moral pemimpin terhadap Allah dan rakyatnya. Pandangan ini memperlihatkan betapa politik, dalam perspektif Ali, tidak bisa dipisahkan dari moralitas dan spiritualitas.

3. Kebijaksanaan Hukum

Kebijaksanaan hukum Ali bin Abi Thalib memperlihatkan kombinasi antara rasionalitas intelektual dan kearifan spiritual. Sebagai salah satu sahabat yang paling memahami syariat, Ali dikenal sebagai faqih yang tajam dan adil dalam memberikan fatwa. Ia tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan nilai kemaslahatan. Dalam menyelesaikan sengketa, Ali sering mengutamakan pendekatan islah (perdamaian) ketimbang penghukuman yang keras, karena baginya, tujuan hukum adalah menegakkan moralitas, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Pandangan ini menunjukkan bahwa peradaban Islam awal tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dari kebijaksanaan hukumnya inilah lahir tradisi hukum Islam yang dinamis, berakar pada etika dan keadilan substansial. (Badriah, 2015).

4. Kesederhanaan Hidup

Kesederhanaan merupakan aspek yang paling menonjol dari etika pribadi Khalifah Ali. Meskipun ia memiliki kekuasaan besar, gaya hidupnya tetap sederhana, jauh dari kemewahan dan simbol-simbol duniawi. Dalam riwayat disebutkan bahwa pakaian Ali sangat

sederhana dan makanannya pun hanya berupa roti kering dan garam. Kesederhanaan ini bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi bagian dari filosofi kepemimpinan yang menolak ketimpangan sosial dan kemewahan penguasa. Dengan hidup sederhana, Ali menegaskan bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyat, bukan berada di atas mereka. Nilai kesederhanaan ini menjadi teladan peradaban Islam tentang zuhd al-quwwah asketisme aktif yang membangun kekuatan moral di tengah tanggung jawab sosial. Sikap ini memperlihatkan bahwa kekuasaan sejati bukan pada harta, melainkan pada pengendalian diri dan ketulusan niat.

5. Amanah Publik

Etika amanah publik bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan hak istimewa. Ia memandang jabatan sebagai beban moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam suratnya kepada Malik al-Asytar, Ali menulis bahwa seorang pemimpin sejati adalah "pelayan rakyatnya, bukan penguasa atas mereka." (Choirun, 2015) Prinsip ini menunjukkan orientasi kepemimpinan berbasis pelayanan publik (public service ethics), jauh sebelum konsep tersebut dikenal dalam teori politik modern. Ali menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan negara. Dengan menjadikan amanah publik sebagai pusat moral pemerintahan, Ali berhasil menanamkan nilai integritas yang menjadi warisan abadi dalam peradaban politik dan intelektual Islam.

Nilai-Nilai Moral

Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik dan ahli hukum, tetapi juga sebagai teladan moralitas tertinggi dalam sejarah peradaban Islam. Nilai-nilai moral yang ia wujudkan dalam kepemimpinan bukan sekadar ekspresi personal, melainkan manifestasi dari prinsip kenabian yang berorientasi pada kemanusiaan universal. Di tengah pergolakan politik dan perpecahan umat, Ali tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keikhlasan, yang menjadi dasar keutuhan moral peradaban Islam awal. Moralitas baginya bukan konsep teoritis, melainkan energi peradaban suatu daya spiritual yang menjaga umat agar tidak kehilangan arah di tengah kekuasaan dan konflik. Karena itu, moralitas Khalifah Ali menjadi acuan penting bagi pembentukan etika publik, politik, dan intelektual Islam hingga masa kini.

1. Keberanian Moral

Keberanian moral Khalifah Ali bin Abi Thalib melampaui keberanian fisik yang sering dikaitkan dengan dirinya dalam medan perang. Ia adalah sosok yang berani menegakkan kebenaran meskipun bertentangan dengan kepentingan politik dan tekanan publik. Dalam konteks pemerintahan, Ali menolak kompromi terhadap prinsip keadilan meski hal itu dapat melemahkan kekuasaannya.

Keberanian moral ini tampak jelas ketika ia menolak menyetujui praktik nepotisme atau politik licik demi kepentingan pribadi. Bagi Ali, keberanian sejati bukanlah mengalahkan musuh di medan perang, tetapi menundukkan hawa nafsu dan mempertahankan kebenaran ketika semua orang memilih jalan mudah. Nilai keberanian moral inilah yang membedakan Ali dari pemimpin pragmatis, menjadikannya simbol kekuatan nurani dalam kepemimpinan Islam. (Dalimunthe, 1986).

2. Keteguhan Prinsip

Keteguhan prinsip merupakan fondasi dari seluruh kebijakan dan keputusan Ali bin Abi Thalib. Ia tidak pernah membiarkan situasi politik menggoyahkan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam. Dalam menghadapi konflik internal seperti Perang Jamal dan Shiffin, Ali memilih tetap berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan politik kelompok tertentu. Prinsipnya yang tegas, "Kebenaran tidak diukur dari manusia, tetapi manusia diukur dari kebenaran," mencerminkan visi moral yang transenden. (Hakim, 2019) Keteguhan prinsip ini mengajarkan bahwa kepemimpinan Islam tidak boleh tunduk pada situasi pragmatis, melainkan harus berpijak pada nilai yang bersifat ilahiah dan rasional. Ketika prinsip moral dijadikan poros kebijakan, maka pemerintahan menjadi stabil secara etis dan berwibawa secara spiritual.

3. Keikhlasan Niat

Keikhlasan niat merupakan jiwa dari seluruh tindakan Khalifah Ali. Dalam setiap kebijakan, ia menegaskan bahwa kekuasaan hanyalah sarana untuk menegakkan kebenaran, bukan tujuan untuk mencari kedudukan. (Fathurrahman, 2017) Ketika sebagian sahabat menawarkan kompromi politik demi memperkuat posisi pemerintahannya, Ali menolak dengan alasan bahwa kemenangan tanpa keikhlasan adalah kehinaan di sisi Allah. Keikhlasan baginya adalah penentu kemurnian amal dan keabsahan kepemimpinan. Nilai ini menegaskan bahwa seorang pemimpin Islam sejati tidak bekerja demi popularitas atau keuntungan, tetapi demi tanggung jawab moral terhadap Allah dan rakyat. Dari keikhlasan inilah lahir kekuatan spiritual yang membentuk integritas dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.

4. Empati Umat

Empati terhadap umat menjadi ciri khas utama moralitas Khalifah Ali. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga memahami penderitaan rakyat secara langsung. Banyak riwayat menggambarkan bahwa Ali kerap menyamar pada malam hari untuk melihat keadaan masyarakat miskin dan membantu mereka tanpa diketahui siapa pun. Tindakan ini bukan sekadar amal sosial, melainkan bentuk *compassionate leadership* kepemimpinan yang peka terhadap realitas sosial. Empatinya lahir dari kesadaran teologis bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Dalam surat-surat

administrasinya, ia selalu menasihati pejabat agar berlaku lembut terhadap rakyat, karena "mereka adalah saudaramu dalam agama atau sesamamu dalam kemanusiaan." Prinsip empati ini memperlihatkan bahwa moralitas Islam bersifat inklusif, humanistik, dan egaliter. (Ilhamni, 2019).

5. Integritas Diri

Integritas diri menjadi puncak dari seluruh nilai moral yang melekat pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia memandang integritas bukan sekadar kejujuran personal, tetapi keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Dalam sejarah pemerintahan Islam, jarang ditemukan pemimpin yang sedemikian konsisten antara kata dan perbuatannya seperti Ali. (Rozali, 2018) Ia tidak pernah memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Bahkan, ia hidup dalam kesederhanaan ekstrem untuk menjaga kemurnian moralnya di tengah godaan dunia politik. Integritas diri inilah yang membangun kepercayaan publik dan menjadikan namanya abadi sebagai simbol kepemimpinan etis. Dalam konteks peradaban Islam, integritas moral Ali menjadi fondasi yang menegaskan bahwa kekuatan sejati sebuah peradaban bukan pada kekuasaan militer atau ekonomi, melainkan pada kejujuran dan ketulusan hati pemimpinnya.

Intelektual Peradaban

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan simbol puncak antara kekuasaan politik dan kecemerlangan intelektual dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya pemimpin negara, tetapi juga pemikir besar yang meletakkan dasar bagi tradisi keilmuan, logika, dan filsafat Islam. Pemikiran-pemikirannya yang terekam dalam Nahj al-Balāghah menjadi bukti kecendekiannya dalam bidang teologi, hukum, dan etika. Ali menempatkan ilmu sebagai jalan menuju kebenaran dan sarana memperkuat iman, bukan sekadar alat rasionalitas duniawi. Di bawah kepemimpinannya, muncul kesadaran intelektual baru bahwa ilmu dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, peradaban Islam pada masa Ali tidak hanya tumbuh melalui kekuasaan politik, tetapi melalui budaya berpikir, berargumentasi, dan mencari hikmah sebagai bentuk ibadah intelektual kepada Allah.

1. Filsafat Hikmah

Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sumber hikmah (hikmah) dalam Islam, yang menggabungkan dimensi rasional dan spiritual. Ucapannya yang terkenal "Nilai seseorang diukur dari apa yang ia pahami" menunjukkan pandangannya bahwa manusia mulia bukan karena status sosial, melainkan karena kedalaman ilmunya. Filsafat hikmah dalam pemikiran Ali tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada kebijaksanaan praktis dalam kehidupan dan pemerintahan. Hikmah baginya adalah kemampuan memahami kebenaran dengan akal dan menegakkannya dengan moral. Inilah dasar dari peradaban intelektual Islam yang melahirkan

generasi cendekiawan seperti Hasan al-Bashri, al-Kindi, dan al-Farabi. Melalui filsafat hikmah, Ali membangun paradigma berpikir yang menyeimbangkan akal dan wahyu, menjadikan ilmu sebagai jalan spiritual menuju keadilan dan kebijaksanaan. (Mubin, 2020).

2. Rasionalitas Syariat

Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh pertama yang menampilkan pendekatan rasional terhadap syariat Islam. Ia memahami hukum bukan semata-mata sebagai teks normatif, tetapi sebagai manifestasi keadilan dan akal sehat. Dalam fatwa-fatwanya, Ali menolak penafsiran hukum yang kaku dan literalistik. Ia menegaskan bahwa setiap hukum harus berorientasi pada kemaslahatan manusia dan nilai keadilan Ilahi. (Choiri, 2019) Pendekatan rasional ini kelak mempengaruhi perkembangan ilmu *uṣūl al-fiqh* dan teologi rasional (*‘ilm al-kalām*), terutama dalam pemikiran Mazhab Syiah dan Mu'tazilah. Ali memperlihatkan bahwa syariat bukan sekadar aturan legal, melainkan sistem etika yang logis dan beralasan. Melalui rasionalitas syariat inilah peradaban Islam berkembang menjadi peradaban hukum dan pemikiran yang ilmiah.

3. Ilmu Kepemimpinan

Dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan (*imāmah*) bukan hanya persoalan politik, tetapi juga ilmu yang menuntut kebijaksanaan, pemahaman sosial, dan kedalaman spiritual. Ia memandang pemimpin sebagai *‘ālim* (orang berilmu) yang harus mampu membimbing rakyat dengan ilmu, bukan kekuatan. Dalam suratnya kepada Malik al-Asytar, Ali menegaskan pentingnya pengetahuan bagi seorang penguasa agar dapat menegakkan keadilan tanpa kezaliman. Ilmu kepemimpinan menurutnya adalah perpaduan antara kecerdasan rasional dan kepekaan moral. Dari sini, lahir konsep *leadership by knowledge* yang menjadi ciri khas peradaban Islam: bahwa kekuasaan yang tidak dilandasi ilmu akan membawa tirani, sementara ilmu tanpa amanah akan kehilangan arah. Kepemimpinan Ali membuktikan bahwa kecerdasan intelektual dan moralitas spiritual harus berjalan beriringan dalam membangun peradaban.

4. Dialog Ilmiah

Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai pelopor tradisi dialog ilmiah dalam Islam. Ia membuka ruang perdebatan dan diskusi dengan berbagai kelompok, baik sahabat, ulama, maupun lawan politiknya, tanpa kehilangan adab dan kedalaman argumen. Dialog baginya adalah bentuk ibadah intelektual cara untuk mencari kebenaran, bukan memenangkan ego. Pendekatan ini membentuk pola komunikasi keilmuan yang konstruktif, yang kemudian melahirkan tradisi majlis *al-‘ilm* di dunia Islam. Dalam debat-debat teologisnya, Ali menunjukkan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat selama dilandasi ilmu dan niat baik. Tradisi dialog ilmiah inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan madrasah ilmu kalam, logika,

dan filsafat Islam di kemudian hari. Dengan demikian, Ali telah menanamkan fondasi intelektual berupa budaya berpikir terbuka dan kritis dalam Islam.

5. Nalar Teologis

Kecemerlangan Ali bin Abi Thalib juga tampak dalam kekuatan nalar teologisnya yang mendalam. Ia mampu menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti takdir, keadilan Ilahi, dan hakikat iman dengan argumentasi yang logis dan rasional. Dalam Nahj al-Balāghah, ia kerap menyinggung hubungan antara akal dan wahyu sebagai dua cahaya yang saling melengkapi. Nalar teologis Ali menolak fatalisme buta dan menegaskan tanggung jawab moral manusia terhadap pilihannya. Pandangan ini melahirkan paradigma teologi etis dalam Islam, di mana akal digunakan untuk memahami kehendak Tuhan secara proporsional. Kontribusi intelektual Ali dalam bidang teologi menjadi pondasi bagi kebangkitan pemikiran Islam abad-abad berikutnya. Ia membuktikan bahwa kekuatan iman tidak bertentangan dengan rasionalitas, melainkan justru bertemu dalam nalar yang tercerahkan. (Soraya, 2016)

Tabel 1. Temuan Penelitian

Aspek	Temuan Historis	Penerapan
Etika Kepemimpinan	Ali menegakkan keadilan sosial dan menolak diskriminasi dalam pembagian baitul mal; menempatkan kepemimpinan sebagai amanah, bukan privilese.	Prinsip transparansi dan anti-korupsi dalam pemerintahan modern; penerapan good governance dan keadilan sosial di lembaga publik.
Kejujuran Politik	Menolak politik manipulatif meski merugikan kekuasaan sendiri; menempatkan kebenaran di atas kepentingan politik.	Penguatan politik etis dan integritas pejabat publik, serta pendidikan karakter bagi pemimpin untuk melawan politik transaksional.
Kebijaksanaan Hukum	Menyeimbangkan antara hukum tekstual dan nilai kemanusiaan; menekankan aspek <i>maslahah</i> dalam penerapan hukum.	Dasar bagi reformasi hukum berbasis kemanusiaan (human rights-based law) dan penegakan hukum yang berkeadilan substantif, bukan formalistik.
Nilai Moral (Empati & Integritas)	Ali hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan menolak gaya hidup mewah penguasa.	Inspirasi bagi pemimpin berkarakter sosial, yang menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kemewahan birokrasi.

Intelektual (Filsafat & Dialog Ilmiah)	Mendorong kebebasan berpikir, musyawarah ilmiah, dan penggunaan akal sehat dalam memahami wahyu.	Dasar bagi budaya akademik dan demokrasi intelektual, seperti diskusi ilmiah terbuka, riset kritis, dan pengembangan sains beretika.
Rasionalitas Syariat	Menafsirkan hukum Islam dengan pendekatan rasional dan kontekstual tanpa meninggalkan nilai spiritual.	Relevan bagi ijtihad kontekstual dan pembaruan hukum Islam, agar ajaran Islam tetap responsif terhadap perubahan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan figur pemimpin Islam yang berhasil menyatukan kekuatan moral, intelektual, dan spiritual dalam satu sistem kepemimpinan yang beradab. Melalui nilai-nilai etika seperti keadilan sosial, kejujuran politik, dan amanah publik, ia membangun fondasi pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat. Moralitasnya yang tercermin dalam keberanian, keikhlasan, empati, dan integritas diri menjadikan kepemimpinannya bukan hanya simbol politik, melainkan teladan universal tentang keutamaan karakter. Selain itu, aspek intelektual seperti filsafat hikmah, rasionalitas syariat, dan tradisi dialog ilmiah menunjukkan bahwa peradaban Islam di masa Ali bukan sekadar religius, tetapi juga ilmiah dan rasional. Dengan perpaduan ini, Ali menegaskan bahwa kekuasaan sejati terletak pada penguasaan ilmu dan moral, bukan pada ambisi kekuasaan duniawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. S., & Masqon, D. (2016). *Tarikh Khadharah Al-Islamiyah* (4th ed.). Ponorogo: Darussalam Press.
- Aini, N. M. (2022). Karakteristik masa pembinaan pendidikan Islam pada masa Rasulullah (Makkah dan Madinah). *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 198–209. <https://doi.org/10.58577/dimar.v3i2.55>
- Al-Mufid, S. (2005). *Sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib AS* (M. A. Maulachela, Trans.; 1st ed.). Jakarta: Lentera.
- Ash-Shalabbi, A. M. (2014). *Biografi Ali bin Abi Thalib*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.
- Audah, A. (2003). *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husein* (1st ed.). Bogor: Lentera Antar Nusa.
- Badriah, L. (2015). Kurikulum pendidikan Islam masa klasik. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 155–176. [https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6\(2\).155-176](https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6(2).155-176)
- Choirun, N. (2015). Pendidikan Islam pada masa Khulafa Al-Rasyidin

- dan Bani Umayyah. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 171–186.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1045/881>
- Dalimunthe, F. (1986). *Sejarah pendidikan Islam*. Medan: Rimbow.
- Fathurrahman, M. (2017). *History of Islamic Civilization*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Hakim, K. (2019). The political communication forms running on Caliph Ali Ibn Abi Thalib's government. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(3), 367–378.
<https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.437>
- Hamka. (1975). *Sejarah umat Islam (Vol. 2)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ilhamni, I. (2019). Pembukuan Al-Qur'an pada masa Usman bin Affan (644–656). *Jurnal Ulunnuha*, 6(2), 130–141.
<https://doi.org/10.15548/ju.v6i2.596>
- Isa, N. A. M., & Rozali, E. A. (2018). Konflik politik semasa pemerintahan 'Ali ibn Abi Talib. *International Journal of West Asian Studies*, 10(6), 60–73.
<https://doi.org/10.22583/ijwas.2018.10.01.06>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lapidus, I. M. (2000). *Sejarah sosial umat Islam (2nd ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maisyaroh. (2019). Kepemimpinan 'Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib. *Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 1, 176–185.
- Mubin, A. (2020). Penyelenggaraan pendidikan Islam zaman klasik (di masa Rasulullah SAW dan era kekhalifahan). *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 16(1), 22–30.
<https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2488>
- Hitti, P. K. (2006). *History of the Arabs* (C. L. Yasin & D. S. Riadi, Trans.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rosita, I. (2009). Dukungan Ali bin Abi Thalib terhadap dakwah Rasulullah. *Jurnal Dakwah*, 10(2), 119–142.
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soekarno, & Supardi, A. (1985). *Sejarah filsafat pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.
- Soraya, N. (2016). Lembaga pendidikan Islam periode awal dalam perspektif sejarah. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 251–261.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1171/990>